

## DAFTAR PUSTAKA

- AmiruddindanZainalAsikin H., PengantarMetodePenelitianHukum, (Jakarta :  
RajawaliPers, 2004)
- AshshofaBurhan, MetodePenelitianHukum, (Jakarta :RinekaCipta, 2004)
- FuadyMunir, HukumKontrak (dariSudut Pandang HukumBisnis), (Bandung :  
Citra AdityaBakti, 2001)
- HarsonoBoedi, HukumAgraria Indonesia Jilid 1, (Jakarta :Djambatan, 2005)
- MuljadiKartinidanGunawanWidjaya, PerikatanPadaUmumnya, (Jakarta :  
RajawaliPers, 2003)
- , Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta :RajawaliPers,  
2004)
- Mashudi H dan Mohammad Chidir Ali (alm), Bab-Bab HukumPerikatan  
(Pengertian-pengertianElementer), (Bandung :MandarMaju,  
1995)
- HasanuddinRahman, Contract Drafting, (Bandung : Citra AdityaBakti, 2003)
- Satrio J, HukumPerikatan (perikatanpadaumumnya), (Bandung : Alumni, 1999)
- , Perikatan yang LahirdariPerjanjianBuku II, (Bandung : Citra  
AdityaBakti, 2001)
- Setiawan R., Pokok-PokokHukumPerikatan, (Bandung :BinaCipta, 1979)
- Soekanto, Soerjono, PengantarPenelitianHukum, (Jakarta : UI-Pers, 1986)
- , Mamudji, Sri, PenelitianHukumNormatif, (Jakarta :RajawaliPers,  
1985)

Soeprapto, Hartono Hadi, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan hukum Jaminan,  
(Yogyakarta : Liberty, 1984)

Subekti R., Aneka Perjanjian, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)

-----, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1978)

Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis kasus), (Jakarta : Pernada  
Media Group, 2004)

Sumitro, Ronny Hanintjo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia  
Indonesia, 1985)

Syahrani, Ridwan, Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung :  
Alumni, 2000)

Wantjik Saleh K., Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)

Wirjono Prodjodikoro R., Asas-Asas hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur, 1993)

Subekti R. dan Tjitrosudibio R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta :  
Pradya Paramita, 1985)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan  
dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Makam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman  
Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna  
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.